

**DAFTAR TANYA JAWAB LAZIM/ *FREQUENTLY ASKED QUESTIONS* (FAQ)
PERATURAN ANGGOTA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG
PENILAIAN KUALITAS PIUTANG PEMBIAYAAN PT SARANA MULTI
INFRASTRUKTUR (PERSERO)**

- 1. Apa latar belakang penerbitan Peraturan Anggota Dewan Komisiner Penilaian Kualitas Piutang Pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) ini?**

PADK ini diterbitkan sebagai ketentuan pelaksanaan mengenai penilaian kualitas piutang pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 52 ayat (6) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- 2. Apa tujuan pengaturan penilaian kualitas piutang pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam PADK ini?**

PADK ini bertujuan sebagai pedoman bagi PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam melakukan penilaian kualitas piutang pembiayaan mengingat Perusahaan memiliki kewajiban untuk menilai, memantau, dan mengambil langkah agar kualitas piutang pembiayaan tetap baik.
- 3. Apa yang diatur dalam PADK ini?**

PADK ini mengatur pedoman penilaian kualitas piutang pembiayaan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) melalui penetapan penilaian kualitas setiap komponen dalam faktor prospek usaha debitur, kinerja keuangan debitur, dan kemampuan membayar debitur sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Pengawasan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
- 4. Bagaimana mekanisme penilaian terhadap komponen dukungan dari pemerintah?**

Penilaian terhadap komponen dukungan dari pemerintah dinilai berdasarkan ada atau tidak adanya dukungan pemerintah pada lingkup pelaksanaan kegiatan usaha dan mitigasi risiko debitur. Oleh karena itu, pengaturan penilaian terhadap komponen dimaksud hanya diberikan pada dua kategori kualitas, yaitu lancar dan macet. Dalam hal terdapat dukungan pemerintah, debitur memperoleh tambahan nilai dalam penilaian kualitas piutang pembiayaan, sedangkan dalam hal tidak terdapat dukungan pemerintah maka diisi dengan “0”.

5. Mengapa dilakukan pemisahan komponen penilaian "dukungan pemerintah" dan "dukungan grup dan/atau afiliasi"?

Pemisahan komponen penilaian "dukungan pemerintah" dan "dukungan grup dan/atau afiliasi" dimaksudkan untuk memberikan perbedaan atas karakteristik dan kedudukan antara pemerintah dan non-pemerintah. Hal tersebut dikarenakan Pemerintah Daerah merupakan entitas publik yang tidak berada dalam struktur grup usaha atau afiliasi korporasi.

6. Kapan pengaturan dalam PADK berlaku?

Pengaturan dalam PADK berlaku sejak tanggal ditetapkan, yaitu 31 Juli 2026.

7. Apa tindak lanjut yang harus dilakukan oleh PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) setelah PADK ini terbit?

PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) perlu melakukan penyesuaian terhadap pedoman internal yang dimiliki serta menyesuaikan praktik bisnis agar selaras dengan penerapan penilaian kualitas aset sesuai ketentuan dalam PADK ini.